

---

## **ANALISIS STAKEHOLDER DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN INDUSTRI BULU MATA PALSU GUNA MENGANTISIPASI PENGANGGURAN DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**<sup>1</sup>Fikri Nur Syafiq, <sup>2</sup>Rina Herlina Haryanti**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: <sup>1</sup>fikrisyafiq@student.uns.ac.id, <sup>2</sup>rinaherlinaharyanti@staff.uns.ac.id

---

### **ABSTRACT**

*Purbalingga Regency is the largest false eyelash producing industrial district in Indonesia and even the world. The false eyelash industry has become one of the mainstays of the economy in Purbalingga Regency, absorbing tens of thousands of workers. In early 2019 the false eyelash industry in Purbalingga District experienced a decline of up to 50% due to competition with China which resulted in many workers being laid off and losing their jobs. To overcome this problem requires a role that involves many stakeholders. The purpose of this study was to determine how the roles of stakeholders are involved and analyze stakeholders based on their power and interests in an effort to maintain the false eyelash industry in Purbalingga Regency. The roles played by stakeholders include policy creators, coordinators, facilitators, implementers and accelerators. This study used a qualitative descriptive method with data collection methods using interviews and documentation. The results showed that in carrying out strategies that include financial strengthening, marketing development, and labor protection, not all role models were carried out by the involved stakeholders. The mapping of stakeholders based on interests and influence shows the company as a key player of all the strategies implemented, stakeholders from the government side have low influence even though they have high interests, this results in no policies issued specifically to deal with this problem so that the workforce is still many have lost their jobs.*

**Keywords:** *Stakeholders, False Eyelashes Industry, Labor, Unemployment*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Dunia industri berkembang sangat pesat, akhir-akhir ini dunia dihadapkan dengan revolusi industri 4.0 bahkan beberapa negara sudah menuju ke revolusi industri 5.0. Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011 (Kagermann et al., 2013). Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut *High-Tech Strategy 2020*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur (Heng, 2014). Industri di zaman sekarang mulai menggeser tenaga-tenaga manusia menjadi tenaga mesin bahkan menciptakan

*artificial intelligence* (AI) guna mempermudah proses produksi. Selain itu persaingan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja juga sudah merupakan hal yang nyata. Industri di era ini sangat dinamis dan menuntut inovasi yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pasar yang juga sangat dinamis.

Persaingan industri dan tenaga kerja di Indonesia sudah nyata terasa. Salah satunya terjadi di industri bulu mata palsu kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kota industri penghasil bulu mata palsu salah satu terbesar di dunia. Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Data tahun 2016 menunjukkan adanya 48 perusahaan pengolahan rambut yang menyerap 32.386 orang pekerja di mana 83 persennya 21 (27.032 orang) adalah pekerja perempuan di mana sembilan orang diantaranya adalah pekerja Warga Negara Asing (WNA). Adapun pekerja laki-laki hanya sebesar 17 persen (5.354 orang) di mana 58 orang di antaranya adalah WNA (Tobirin et al., 2018). Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2018 nilai ekspor rambut dan bulu mata palsu mencapai 3 triliun rupiah (Sumarwoto, 2019).

Hingga awal tahun 2019 industri bulu mata palsu Purbalingga berjalan dengan baik-baik saja, sampai pada masa dimana bulu mata produksi Purbalingga tersaingi oleh produksi dari Negara Tiongkok. Pada awal tahun 2019 Sebanyak 1.500 karyawan pabrik bulu mata di Purbalingga, Jawa Tengah dirumahkan menyusul lesunya pasar ekspor bulu mata di negara-negara tujuan. Selain itu, guncangan gejolak industri bulu mata juga berdampak pada ribuan tenaga kerja di plasma-plasma bulu mata. Menurut kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Purbalingga jumlah itu belum pasti, karena perusahaan belum mau terbuka soal berapa jumlah buruh di perusahaan mereka yang dirumahkan (Ridlo, 2019).

Perbandingan produksi antara industri bulu Purbalingga dengan Tiongkok bisa dibilang sudah cukup jauh. Menurut Bupati Purbalingga, pemilik-pemilik perusahaan menyampaikan produktivitas industri Tiongkok 9 kali lebih produktif dibandingkan industri di Purbalingga. Salah satu yang mengalami penurunan serapan adalah PT Hyup Sung Indonesia, sebuah perusahaan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Korea Selatan. Pemilik PT Hyup Sung Indonesia, Song Hyung Keun mengatakan, produksi bulu mata palsu di perusahaannya menurun tajam seiring dengan permintaan pasar yang anjlok. Penurunan produksi mencapai 30 persen. Biasanya rata-rata produksi per bulan mencapai 1,3 juta buah. Tetapi, kini produksi tidak sampai 1 juta buah. Dari harga, bulu mata produksi Tiongkok sangat bersaing. Dengan kualitas

yang hampir sama dengan buatan tangan namun ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut semakin membuat serapan bulu mata produksi Purbalingga di pasar semakin menurun (Ridlo, 2019). Dengan kondisi tersebut, pada akhirnya perusahaan melakukan efisiensi dengan merumahkan karyawan-karyawan mereka demi memangkas biaya produksi. Pemilik PT Indokores Sahabat, Hyung Don Kim mengakui perusahaan tengah alami stagnasi kinerja. Jika pasaran lesu, dia memprediksi perusahaan hanya bisa bertahan 5-10 tahun. Masalah industri bulu mata palsu Purbalingga merupakan masalah bersama dimana ada banyak *stakeholder* yang terlibat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga buruh itu sendiri.

Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau program pembangunan (Sumarto, 2003). Menurut Purnawan (2014) analisis stakeholder diperlukan untuk memastikan dukungan dan komitmen terjeda dari semua stakeholder. Untuk menangani permasalahan ini diperlukan peran oleh banyak stakeholder. Stakeholder perlu memiliki komitmen dan koordinasi untuk bekerjasama (Andriyanto, 2017)

Penelitian ini menggunakan teori peran stakeholder yang dikemukakan oleh (Nugroho et al., 2014) yang membagi stakeholder berdasarkan perannya kedalam lima kategori yaitu: 1) *Policy creator, Stakeholder* berperan sebagai pembuat kebijakan dan keputusan. 2) Koordinator, *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat. 3) Fasilitator, *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. 4) Implementor, *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. 5) Akselerator, *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Menurut Reed (2012) analisis stakeholder dilakukan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, mengelompokkan dan mengkategorikan pemangku kepentingan dan menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan.

Selain melihat peran *stakeholder*, penelitian ini juga akan menganalisis *stakeholder* berdasarkan *power* dan *interest* yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan kebijakan yang akan ditempuh dalam menangani masalah ini, teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh (Eden & Ackermann, 1998) yang mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan tingkat power dan interest kedalam empat

kategori yaitu: 1) Subject, *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang rendah, *Stakeholder* ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya. 2) *Key players*, *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi. 3) *Crowd*, *stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang rendah. 4) *Context Setter*, *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran *stakeholder* dan memetakan *stakeholder* berdasarkan *power* dan *interest* dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga.

## B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran *stakeholder* dan memetakan *stakeholder* berdasarkan *power* dan *interest* dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga dipilih secara *purposive* karena kabupaten purbalingga merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia dan salah satu di dunia yang menjadi sentra industri bulu mata palsu.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para informan terkait. Selain itu, adapun sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan data dokumentasi atau arsip yang relevan dengan peran *stakeholder* yang terlibat dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. Pada penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti berusaha mencari informan yang sanggup serta mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam terkait *stakeholder* yang terlibat dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. Pada tahap ini informan yang diambil adalah sebagai berikut: 1) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Purbalingga. 2) Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Purbalingga. 3) Kasi

Pengupahan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. 4) Kasi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. 5) *Manager* produksi salah satu perusahaan bulu mata palsu Kabupaten Purbalingga. 6) Tenaga Kerja salah satu perusahaan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga.

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman dalam dalam (Miles & Huberman, 1992), teknik analisis data model interaktif terdiri atas: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adapun *stakeholder* yang terlibat dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purbalingga
3. APINDO (Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia) Kabupaten Purbalingga
4. SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Purbalingga
5. Perusahaan bulu mata palsu
6. Investor/Bank (Kreditur)
7. Tenaga Kerja
8. ITPC

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran stakeholder upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga, peneliti menggunakan 6 model peran stakeholder yang dikemukakan oleh (Nugroho et al., 2014) yaitu:

#### 1. **Policy Creator**

Dinas Tenaga Kerja mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis seputar hubungan industrial agar pada saat kondisi banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan kedua pihak baik tenaga kerja maupun perusahaan tidak ada yang dirugikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mengadakan pelatihan pemasaran dan

pengembangan ekspor. Perusahaan juga mengambil kebijakan yaitu melakukan pengurangan tenaga kerja dan menentukan kebijakan pemasaran perusahaan.

## **2. Koordinator**

*Stakeholder* yang berperan sebagai koordinator yaitu Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja mengkoordinasikan perusahaan dan tenaga kerja melalui LKS tripartite sebagai upaya untuk menjaga hubungan industrial tetap baik selain itu Dinas Tenaga Kerja juga berperan sebagai mediator terhadap kedua pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan dalam proses menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

## **3. Fasilitator**

Stakeholder yang berperan sebagai fasilitator yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, APINDO, SPSI, Investor/Bank (Kreditur). Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi perusahaan terkait pemasaran dengan mengikutsertakan dalam pameran baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga bisa menghubungkan perusahaan dengan kementerian pusat dan ITPC dalam rangka membuka tujuan pasar baru. Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi perusahaan dan tenaga kerja dengan menerima aduan apabila kedua pihak tersebut mengalami perselisihan hubungan industrial. APINDO sebagai representasi perusahaan juga bisa memfasilitasi perusahaan dengan cara memberikann banruan advokasi yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial. Hampir sama dengan APINDO, SPSI juga memfasilitasi tenaga kerja dengan memberikan bantuan advokasi dalam proese perselisihan hubungan industrial. Terrkait penguatan finansial perusahaan, investor, bank (kreditur) juga dapat memberikan fasilitasi berupa tambahan modal bagi para perusahaan.

## **4. Implementor**

Merupakan stakeholder yang berperan melaksanakan program atau kebijakan. Stakeholder yang termasuk kedalam implementor yaitu perusahaan dan tenaga kerja. Perusahaan melaksanakan peraturan perlindungan tenaga kerja dan hubungan tenaga kerja (Peraturan perusahaan, PKB, dan undang – undang). Perusahaan juga melaksanakan program – program yang disediakan pemerintah terkait pemasaran produk bulu mata palsu. Sama seperti perusahaan tenaga kerja juga melaksanakan kewajiban tenaga kerja sesuai peraturan yang ada (Peraturan perusahaan, PKB, Undang – Undang). Tenaga kerja juga melaksanakan undang-undang hubungan industrial yang ada.

## 5. Akselerator

Akselerator merupakan stakeholder yang berperan dalam mempercepat tercapainya tujuan. Stakeholder yang termasuk kedalam akselerator yaitu ITPC. ITPC berperan dalam membuka pasar baru produk bulu mata palsu Kabupaten Purbalingga. Sudah sejak lama Amerika Serikat menjadi tujuan pasar utama dari bulu mata palsu Kabupaten Purbalingga. Namun karena permintaan yang menurun, perusahaan harus mencari alternatif pasar baru seperti Timur Tengah dan Amerika Selatan.

Setelah mengetahui stakeholder yang terlibat dan peran stakeholder. Stakeholder kemudian dipetakan berdasarkan *power* dan *interest* pada masing – masing strategi yang dilakukan, hasil pemetaan adalah sebagai berikut:

### 1. Strategi Penguatan Finansial

Ditengah kondisi industri bulu mata palsu yang menurun, kondisi finansial perusahaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar tidak semakin banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Pemetaan stakeholder yang terlibat dalam strategi penguatan finansial adalah sebagai berikut:

#### a. *Key players*

Merupakan kelompok *stakeholder* yang memiliki kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi. Kelompok *stakeholder* yang termasuk dalam *key players* dalam hal strategi penguatan finansial dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu yaitu perusahaan dan investor. Investor memiliki kepentingan yang tinggi yaitu bagaimana perusahaan yang mereka sudah beri modal tidak tutup dan bangkrut. Dari segi pengaruh atau kekuasaan investor sudah jelas memiliki modal yang bisa diberikan kepada perusahaan sebagai tambahan modal agar perusahaan dapat terus berjalan di tengah kondisi pasar yang sedang menurun. Selain investor yang berperan sebagai *key players*, perusahaan juga termasuk dalam kategori ini. Perusahaan dalam hal ini memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan – kebijakan yang ditempuh. Untuk mengatasi kondisi finansial perusahaan yang menurun akibat turunya permintaan pasar, perusahaan melakukan berbagai peran atau kegiatan meliputi mencari pinjaman dan tambahan modal hingga melakukan pengurangan karyawan. Perusahaan juga memiliki kepentingan yang tinggi karena selain berkepentingan dalam mencari keuntungan, perusahaan juga

mengakomodasi kepentingan pihak lain seperti tenaga kerja agar tetap mendapat hak mereka sesuai dengan ketentuan.

### **b. Crowd**

*Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan ( *interest* ) dan pengaruh ( *power* ) yang rendah. Berdasarkan perannya dalam strategi penguatan finansial dalam upaya memperhankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga, *stakeholder* yang termasuk kedalam kelompok *crowd* yaitu bank. Terkait tingkat kepentingan dan pengaruh, bank memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Hal tersebut dikarenakan pinjaman yang diberikan bank kepada perusahaan – perusahaan bulu mata palsu bukan merupakan sumber pendapatan bank satu – satunya, ada banyak sumber – sumber lainnya dimana bank bisa memberikan pinjaman. Bank juga memiliki pengaruh yang rendah, hal tersebut dikarenakan pinjaman yang diberikan kepada bank tergantung dari keputusan perusahaan itu sendiri.

## 2. Strategi Pemasaran

Persaingan produk sejenis menyebabkan permintaan pasar terhadap produk bulu mata palsu Kabupaten Purbalingga menurun. Perlu adanya strategi pemasaran seperti mencari tujuan pasar baru yang memerlukan peran dari banyak *stakeholder* yang berasal dari lintas sektor. Pemetaan *stakeholder* dalam strategi pemasaran dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu berdasarkan kepentingan dan pengaruh digambarkan sebagai berikut:

### **a. Subjects**

Stakeholder yang termasuk kedalam subjects adalah ITPC (Indonesian Trade Promotion Center). Terkait dengan kepentingan ITPC memiliki *interest* yang tinggi. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:10/M-DAG/PER/3/2010 ITPC mempunyai tugas melakukan pelaksanaan teknis kegiatan promosi perdagangan di luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor komoditi barang dan jasa. ITPC memiliki 4 tugas pokok dan fungsi yaitu penetrasi pasar, pelayanan informasi pasar, promosi ekspor, dan pelayanan kepada dunia usaha. Berdasarkan penjelasan diatas ITPC memiliki kepentingan yang tinggi dalam mempromosikan komditi ekspor Indonesia di luar negeri. Meskipun memiliki kepetingan yang besar, dalam pemasaran bulu mata palsu ITPC memiliki pengaruh yang rendah. Hal tersebut dikarenakan ada banyak bidang atau produk yang harus dipromosikan oleh



ITPC. Selain itu perusahaan juga tidak selalu menggunakan jasa ITPC dalam promosi karena mereka juga memiliki tim marketing sendiri. Selain ITPC, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga termasuk kedalam *subjects*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kepentingan yang besar dalam pemasaran produk bulu mata palsu Kabupaten Purbalingga. Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam bidang perdagangan terdapat sub bagian bina usaha dan pengembangan ekspor. Bidang tersebut berupaya mengembangkan ekspor terutama di Kabupaten Purbalingga berupaya mengembangkan ekspor produk – produk unggulan dari Kabupaten Purbalingga salah satunya bulu mata palsu. Meskipun memiliki kepentingan yang besar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki pengaruh yang kecil dalam pemasaran produk bulu mata palsu. Hal itu disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang ada memiliki tim marketing sendiri yang juga sudah besar, selain itu, penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditentukan oleh perusahaan

#### **b. Key Players**

*stakeholder* yang termasuk kedalam kelompok key players yaitu perusahaan bulu mata palsu itu sendiri. Dari segi kepentingan, perusahaan memiliki kepentingan yang besar. hal itu dikarenakan perusahaan yang memproduksi bulu mata palsu itu sendiri, sehingga harus dapat memasarkan produk mereka agar mendapat keuntungan. Dalam melakukan pemasaran, perusahaan bulu mata memiliki tim marketing sendiri yang berperan menghubungkan *buyer - buyer* dari luar negeri. Perusahaan – perusahaan mencoba membuka pasar baru di Timur Tengah dan Amerika Selatan. Hal tersebut menunjukkan perusahaan memiliki pengaruh yang besar.

#### **c. Crowd**

Berdasarkan perannya dalam strategi pemasaran dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu *stakeholder* yang termasuk kedalam crowd yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja hanya berperan dalam membuat model – model bulu mata palsu. Perusahaan menentukan model dan jumlah bulu mata palsu yang diproduksi oleh tenaga kerja. kepentingan tenaga kerja juga lebih kepada pemenuhan hak – hak mereka. Perusahaan tidak ikut berperan dalam pemasaran produk yang telah mereka hasilkan

### 3. Perlindungan Tenaga Kerja

Kondisi industri bulu mata saat ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan hingga di – PHK. Dalam kondisi tersebut, perlindungan tenaga kerja sangat penting dilakukan. Agar berjalan dengan baik, perlindungan tenaga kerja melibatkan banyak *stakeholder*. Pemetaan *stakeholder* yang berperan dalam perlindungan tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **a. Subjects**

Berdasarkan perannya dalam perlindungan tenaga kerja dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu, *stakeholder* yang termasuk kedalam kelompok *subjects* yaitu APINDO, SPSI, dan Tenaga Kerja. Tenaga kerja dalam kasus ini memiliki kepentingan yang tinggi. Mereka harus mendapat perlindungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan tenaga kerja seperti pembayaran gaji sesuai dengan aturan dan kesepakatan, PHK yang sesuai prosedur dan tidak merugikan tenaga kerja menjadi hal yang sangat penting ditengah banyaknya tenaga kerja industri bulu mata palsu yang dirumahkan hingga di-PHK. Meskipun memiliki kepentingan yang besar, tenaga kerja memiliki pengaruh atau kekuasaan yang kecil. dalam kondisi ini, tenaga kerja hanya bisa menerima apabila mereka harus dirumahkan atau di – PHK. tenaga kerja juga lebih lemah dibanding perusahaan dalam menghadapi masalah hubungan industrial dibanding dengan perusahaan yang memiliki banyak sumber daya. Selain tenaga kerja, SPSI juga memiliki kepentingan yang besar. SPSI berperan sebagai fasilitator bagi tenaga kerja dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial. SPSI merupakan organisasi yang Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang serikat pekerja atau buruh menyatakan serikat pekerja merupakan organisasi atau alat yang digunakan untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan serta kesejahteraan tenaga kerja. Sama seperti SPSI, APINDO juga memiliki kepentingan yang besar. APINDO berperan sebagai fasilitator bagi perusahaan. APINDO mewakili perusahaan merupakan organisasi yang berperan dengan cara memberi bantuan advokasi dan perlindungan kepada perusahaan dalam menghadapi permasalahan hubungan industrial. Meskipun memiliki kepentingan yang besar, ketiga *stakeholder* tersebut memiliki pengaruh yang kecil. hal itu dikarenakan mereka tidak bisa menentukan kebijakan atau hasil dalam permasalahan industrial.

Ada pemerintah dan perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih besar terkait permasalahan perlindungan tenaga kerja.

### **b. Key Players**

Berdasarkan perannya terkait perlindungan tenaga kerja, *stakeholder* yang termasuk kedalam *key players* yaitu Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja. Terkait kepentingan yang besar, Dinas Tenaga kerja menangani permasalahan perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat empat jenis perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja yaitu perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan serikat pekerja. Dinas Tenaga Kerja juga memiliki pengaruh yang besar dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Dinas tenaga kerja berperan dalam menerima aduan hingga mediator dalam permasalahan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja dapat memutuskan hasil dari masalah hubungan industrial tersebut dalam proses mediasi tersebut. Perusahaan juga memiliki kepentingan yang besar dalam masalah ini. produk bulu mata palsu Kabupaten Purbalingga merupakan produk *handmade* dimana sebagian besar dikerjakan oleh tenaga manusia. Oleh karena itu perusahaan sangat tergantung pada tenaga kerja dalam proses produksi. Perusahaan harus melaksanakan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja agar produksi tidak terganggu. Mulai dari peraturan perusahaan, PKB, hingga Undang – Undang dari pemerintah.

## **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang penulis sampaikan mengenai Analisis Stakeholder Dalam Upaya Mempertahankan Industri Bulu Mata Palsu Guna Mengantisipasi Pengangguran di Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang terlibat dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kabupaten Purbalingga, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Purbalingga, ITPC (Indonesian Trade

Promotion Center), Kreditur (investor dan bank) perusahaan bulu mata palsu, dan tenaga kerja perusahaan bulu mata palsu.

2. *Stakeholder* yang terlibat memiliki peran yang berbeda – beda, yang dapat diklasifikasikan dalam teori yang dikemukakan oleh (Nugroho et al., 2014) sebagai berikut:
  - a. Policy Creator merupakan *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu sebuah kebijakan. *Stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, dan perusahaan bulu mata palsu itu sendiri.
  - b. Koordinator, *stakeholder* yang mengkoordinasikan *stakeholder* lainnya dalam upaya mempertahankan industri bulu mata palsu yaitu Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja mengkoordinasikan *stakeholder* lainnya terkait menjaga hubungan industrial yaitu APINDO dan SPSI melalui LKS tripartite
  - c. Fasilitator, *stakeholder* yang memfasilitasi atau mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. *Stakeholder* yang memfasilitasi kelompok sasaran dalam hal ini perusahaan dan tenaga kerja yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bidang strategi pemasaran dan Dinas Tenaga Kerja dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Selain itu ada APINDO, dan SPSI yang memfasilitasi perusahaan dan tenaga kerja melalui bantuan advokasi dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial
  - d. Implementor, *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan atau aturan termasuk kelompok sasaran. *Stakeholder* yang termasuk kedalam implementer yaitu perusahaan dan tenaga kerja industri bulu mata palsu.
  - e. Akselerator, *stakeholder* yang berperan mempercepat tercapainya suatu tujuan. *Stakeholder* yang berperan sebagai akselerator yaitu ITPC yang mempromosikan bulu mata palsu produksi Kabupaten Purbalingga di luar negeri.
3. Peran yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder memiliki pengaruh yang berbeda-beda yang disebabkan oleh kekuasaan atau pengaruh yang

berbeda-beda pula, adapun pemetaan stakeholder berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Eden & Ackermann, 1998), sebagai berikut:

- a. Dalam strategi penguatan finansial, perusahaan dan investor termasuk kedalam *key players* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Sedangkan bank termasuk kedalam *crowd* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- b. Dalam strategi pemasaran, ITPC dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk kedalam *subjects* sebagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah. Perusahaan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk kedalam *key players*, dan tenaga kerja termasuk kedalam *crowd*.
- c. Dalam perlindungan tenaga kerja, perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja termasuk kedalam *key players*. Tenaga kerja, APINDO, dan SPSI termasuk kedalam *subjects*.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Alangkah baiknya Pemerintah perlu segera menyusun sebuah kebijakan atau program khususnya dalam segi permodalan industri yang dalam proses penyusunannya melibatkan *stakeholder* lainnya yaitu perusahaan, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelaku – pelaku industri dalam hal ini industri bulu mata palsu.
2. Pemertintah perlu untuk lebih berkoodinasi dengan perusahaan terkait strategi pemasaran yang ditempuh agar program atau kebijakan yang ditawarkan dapat lebih dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan, karena selama ini hanya perusahaan yang menjadi *key players* dan pemerintah memiliki pengaruh yang rendah.
3. Perusahaan lebih proaktif memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang ada terkait pemasaran yang ditawarkan oleh pemerintah seperti bekerjasama dengan ITPC dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga dapat membuat pasar lebih luas lagi yang nantinya membuat perusahaan dapat terus melakukan produksi.

4. Untuk mengantisipasi dan mengurangi perselisihan hubungan industrial pada kondisi sekarang, pemahaman hubungan industrial khususnya pada tenaga kerja lebih ditingkatkan lagi, terlebih dalam hal perlindungan tenaga kerja tenaga kerja memiliki pengaruh atau *power* yang paling rendah jika dibandingkan dengan perusahaan dan pemerintah. Sosialisasi atau bimbingan teknis oleh lintas *stakeholder* seperti Dinas Tenaga Kerja, SPSI, maupun APINDO lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut diharapkan agar hak – hak tenaga kerja dapat terpenuhi dengan baik tanpa merugikan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Ferdy dan Hartuti Purnaweni. (2017). Analisis Stakeholders Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. *Journal of Public And Management Review*. Vol.6, No.2.
- Eden, C., & Ackermann, F. (1998). *Making strategy: the journey of strategic management*. Sage Publications.
- Heng, S. (2014). *Industry 4.0 Upgrading of Germany's industrial capabilities on the horizon*.
- Kagermann, H., Lukas, W. D., & Wahlster, W. (2013). *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group*.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UIP.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1).
- Ridlo, M. (2019). *Siasat Purbalingga Melawan Gempuran Produk Bulu Mata Palsu Tiongkok di Eropa*. Liputan6.  
<https://www.liputan6.com/regional/read/3922136/siasat-purbalingga-melawan-gempuran-produk-bulu-mata-palsu-tiongkok-di-eropa>
- Roslinda, Emi. 2012. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *JMHT Vol. XVII, No.2, pp: 78-85*

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sumarto, Hefifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor

Sumarwoto. (2019). *Purbalingga dorong IKM tingkatkan kualitas produksi komoditas ekspor*. Antara News. <https://jateng.antaranews.com/berita/227141/purbalingga-dorong-ikm-tingkatkan-kualitas-produksi-komoditas-ekspor>

Purnawan, Ni Luh Ramaswati. (2014). Stakeholders Analysis: A Step Toward Designing Effective Relations During Changes. *Jurnal Ilmiah FISIP, Vol. 5, No. 1*

Tobirin, Darwin, M., & Widaningrum, A. (2018). Kebijakan Ramah Perempuan dan Anak Dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga. *Palastren, 11(25–50)*.